

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai salah satu cara sebuah negara untuk mengembangkan kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan awalnya digunakan dalam artian pertumbuhan ekonomi dari masyarakat di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui produktivitas masyarakat pada tiap tahunnya, jika pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang tinggi dan meningkat secara konsisten, maka masyarakat dianggap telah berhasil dalam pelaksanaan pembangunan (Rochajat,dkk:2011). Pembangunan ekonomi berkaitan dengan adanya pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan ekonomi memberi dorongan agar terjadi peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan diikuti perubahan dalam struktur perekonomian atau disebut dengan *growth plus change*. Menurut Subandi (2011:9-11), pembangunan yang telah tersusun dan terencana dinilai sebagai usaha yang berdampak pada pembangunan masyarakat.

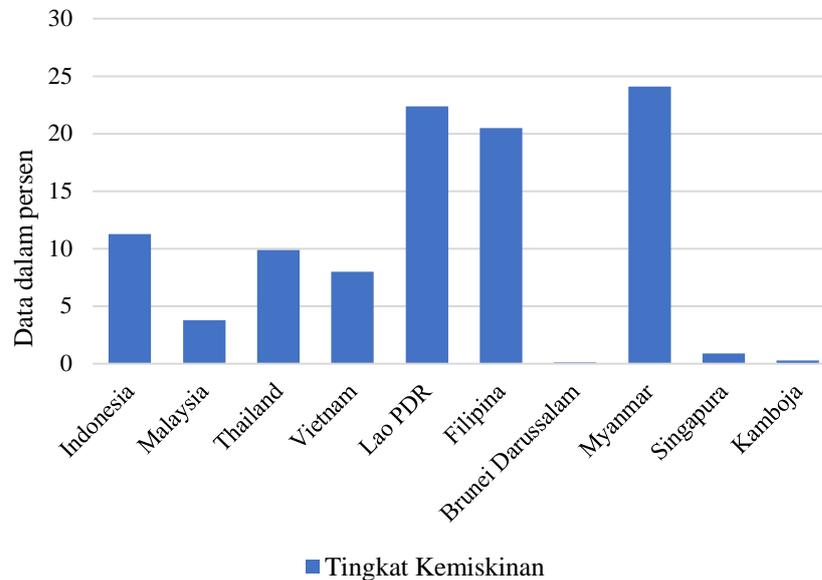
Salah satu sasaran penting dalam pembangunan ekonomi yaitu dengan mengurangi persentase dari tingkat kemiskinan, karena kemiskinan termasuk dalam satu dari problematika ekonomi yang dapat menghambat suatu negara untuk bergerak maju dalam mencapai tujuannya. Tingkat

kemiskinan yang ada di suatu negara dapat menunjukkan kondisi kesejahteraan yang ada dalam masyarakat.

Salah satu tolok ukur dari kesejahteraan masyarakat dapat ditunjukkan dari seberapa tinggi tingkat kemiskinan yang ada di suatu negara. Kemiskinan tergolong permasalahan yang kompleks dan memiliki sifat yang universal sehingga keberadaan dari kemiskinan ini dapat dialami oleh setiap negara terutama pada negara - negara berkembang contohnya seperti Indonesia. Bagi Indonesia yang menjadi negara berkembang dan negara yang berada pada status *lower middle income* yang sebelumnya berada pada *upper middle income*, kemiskinan merupakan permasalahan penting dan pokok karena memiliki dampak pada pembangunan ekonomi (Bank, 2021).

Kemiskinan dapat terjadi ketika sebagian masyarakat tidak mampu untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar hidupnya pada kategori yang layak. Ketidakmampuan masyarakat inilah yang dapat menjadi faktor penyebab dari penurunan kualitas sumber daya manusia yang memberikan dampak negatif lainnya yaitu semakin rendahnya produktivitas dan pendapatan yang diperoleh masyarakat (Purnama, 2017). Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan penduduk yang dilihat dari segi ekonomi dan diukur melalui pengeluaran untuk pemenuhan akan kebutuhan dasar makanan maupun non makanan. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya masih berada di bawah garis kemiskinan, maka dikategorikan sebagai penduduk miskin (BPS Jawa Timur, 2021).

Gambar 1.1.
Grafik Tingkat Kemiskinan di ASEAN
Tahun 2019



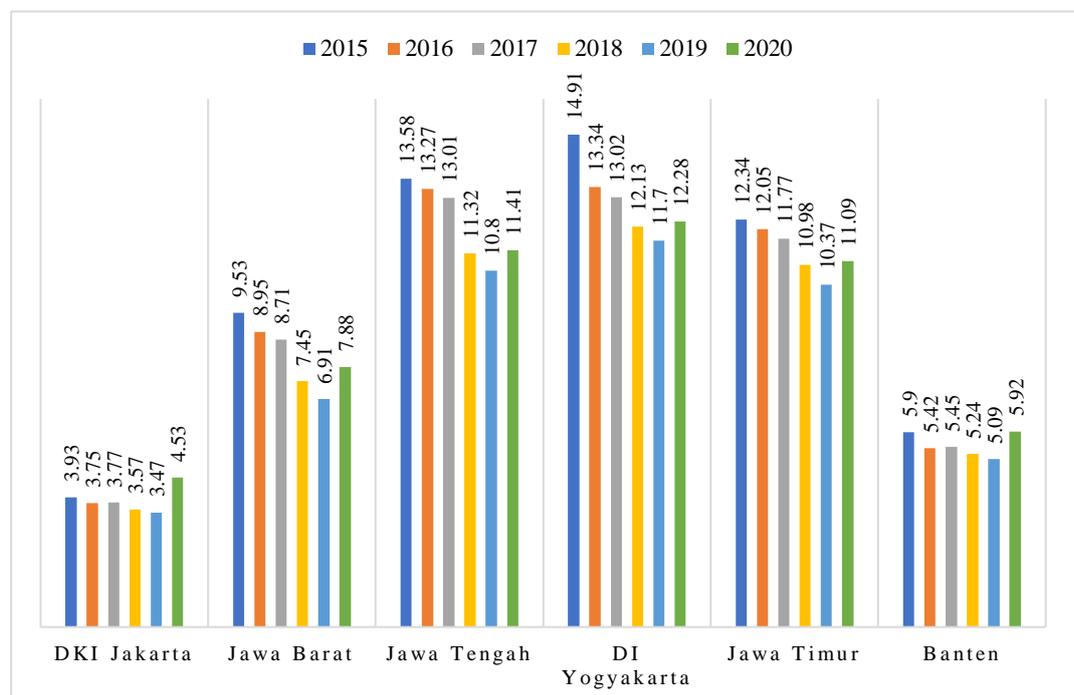
Sumber: Indexamundi.com (Nasution, Sari and Lubis, 2021)

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dilihat bahwa dari 10 negara yang termasuk dalam ASEAN, Indonesia berada pada urutan ke 4 setelah Filipina yaitu dengan tingkat kemiskinan mencapai 11,3 persen pada Desember 2019. Berbagai kebijakan dan program – program telah pemerintah Indonesia lakukan demi menanggulangi permasalahan kemiskinan ini, seperti adanya program bantuan modal ataupun uang tunai dan bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Program – program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah Indonesia telah menyasar sampai pada kelompok masyarakat bawah tetapi pada kenyataannya hasil yang didapatkan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini menandakan bahwa kemiskinan di Indonesia masih memerlukan perhatian lebih dan khusus dalam pengentasannya karena

kemiskinan menjadi ukuran yang dapat menunjukkan kondisi kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Kemiskinan di Indonesia tidak terlepas dari seberapa besar persentase dari tingkat kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kemiskinan yang ada di beberapa provinsi masih menunjukkan persentase yang lebih tinggi daripada persentase tingkat kemiskinan secara nasional. Fakta menunjukkan bahwa salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan tinggi yaitu Provinsi Jawa Timur. Berikut dapat disampaikan berupa data persentase tingkat kemiskinan di beberapa provinsi yang ada di Pulau Jawa pada tahun 2015 hingga tahun 2020.

Gambar 1.2.
Grafik Persentase Tingkat Kemiskinan pada Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2015 - 2020



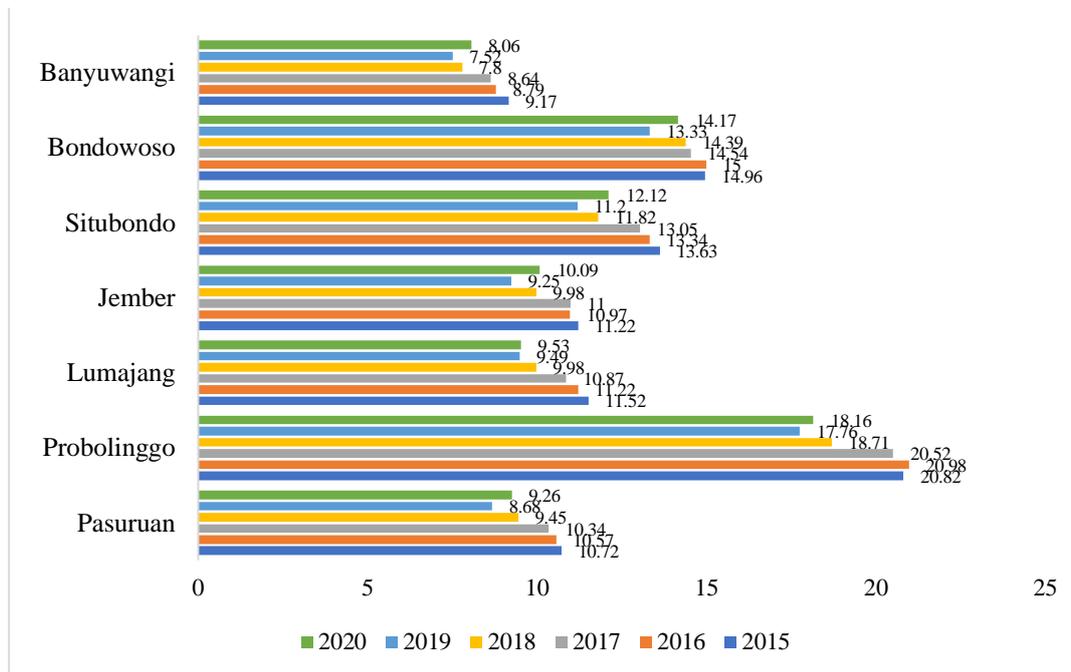
Sumber: BPS, Berbagai Tahun Penelitian (data diolah)

Berdasarkan pada gambar 1.2. dapat diketahui dalam grafik persentase tingkat kemiskinan pada provinsi – provinsi yang berada pada

Pulau Jawa, bahwa selama tahun 2015 hingga 2020 Provinsi Jawa Timur selama 6 tahun berturut - turut masuk ke dalam 3 besar provinsi yang memiliki persentase tingkat kemiskinan paling tinggi di Pulau Jawa yaitu dengan persentase tingkat kemiskinan setelah Provinsi Jawa Tengah. Persentase tingkat kemiskinan pada 6 provinsi di Pulau Jawa mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami penurunan tidak terkecuali pada persentase tingkat kemiskinan pada Jawa Timur yang menunjukkan penurunan selama tahun 2015 sebesar 12,34 persen sampai dengan tahun 2019 sebesar 10,37 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 11,09 persen karena dampak dari pandemi *Covid-19*. Berdasarkan data tersebut dapat dibuktikan bahwa Provinsi Jawa Timur masih membutuhkan perhatian khusus dengan kebijakan – kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Tingkat kemiskinan yang tinggi juga terjadi pada daerah kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Timur. Begitu pula tingkat kemiskinan yang terjadi pada Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten yang memiliki persentase tingkat kemiskinan tinggi pada daerah bagian timur Provinsi Jawa Timur atau biasa disebut dengan daerah tapal kuda. Berikut data persentase tingkat kemiskinan pada daerah bagian tapal kuda :

Gambar 1.3.
Grafik Persentase Tingkat Kemiskinan pada Daerah Bagian Timur Provinsi Jawa Timur (Tapal Kuda), Tahun 2015-2020



Sumber: BPS, Berbagai Tahun Penerbitan (data diolah)

Berdasarkan data yang telah disajikan pada gambar 1.3. menunjukkan persentase dari tingkat kemiskinan yang ada pada wilayah bagian timur Provinsi Jawa Timur atau biasa disebut dengan Tapal Kuda. Terlihat dari 7 kabupaten yang ada, persentase dari tingkat kemiskinan tahun 2015 sampai 2020 terjadi fluktuasi. Kabupaten Jember mengalami penurunan tingkat kemiskinan pada 2016 yaitu dari yang semula sebesar 11,2 persen menjadi 10,97 persen dan kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 11,00 persen. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, tingkat kemiskinan konsisten mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2020 kembali meningkat sebesar 0,84 persen, sehingga yang awalnya pada tahun 2019 tingkat kemiskinan sebesar 9,25 persen meningkat menjadi 10,09 persen pada tahun 2020.

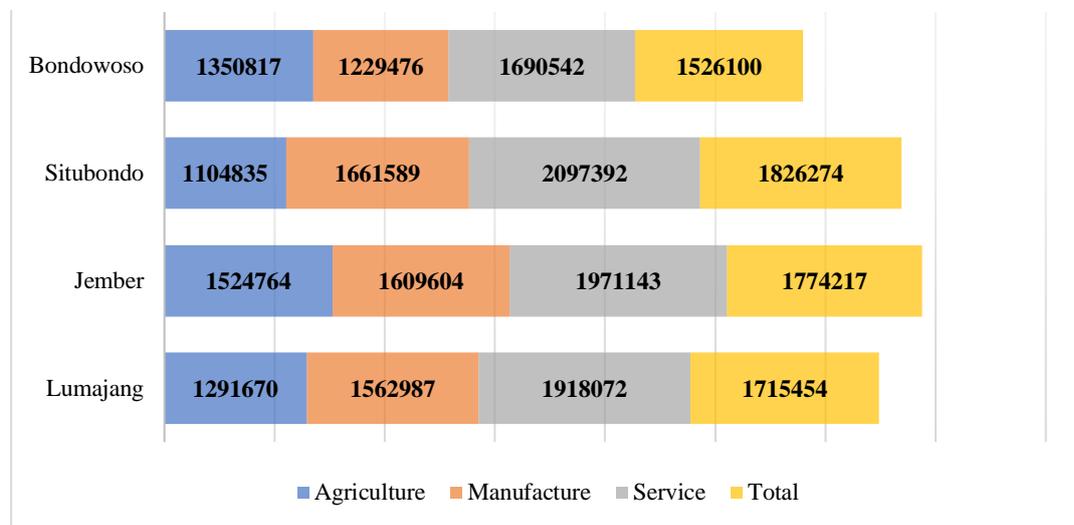
Kabupaten Jember dapat dikatakan sebagai kabupaten yang lebih maju daripada kabupaten – kabupaten di sekitarnya, seperti Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Hal ini dapat dilihat dari kondisi wilayah Kabupaten Jember, seperti yang dikatakan oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur yaitu Emil Elestianto Dardak bahwa Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran strategis besar untuk dapat menjadi *Center of Gravity* bagi kabupaten sekitarnya yang berada di kawasan Tapal Kuda. Adanya Universitas Jember sebagai salah satu universitas ternama di Indonesia, dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam terwujudnya Jember sebagai *Center of Gravity* tersebut (Mulyono, 2020).

Hasibuan, Juanda, dan Mulatsih (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebagian besar penduduk desa yang bekerja pada sektor pertanian umumnya berprofesi sebagai buruh tani dan buruh kasar, sehingga pendapatan masyarakat sangat rendah, hal inilah yang menjadi faktor dominan dari tingginya tingkat kemiskinan. Wilayah pedesaan dapat ditandai dengan ketertinggalan pada perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi, seperti contohnya rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh kurangnya fasilitas pendidikan, rendahnya pendapatan, kualitas lingkungan yang kurang sehat, rendahnya gizi, terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga sulit untuk meningkatkan produktivitas perekonomian (Rustanto, 2015;88).

Tingkat kemiskinan dapat diakibatkan karena mata pencaharian penduduk di suatu wilayah lebih banyak yang berada pada bidang agraris

seperti menjadi buruh tani daripada mata pencaharian yang lebih modern seperti sebagai karyawan pabrik industri barang maupun bidang jasa, dan lain sebagainya. Struktur lapangan pekerjaan utama memiliki pembagian 3 sektor yang terdiri dari Sektor *Agriculture*, *Manufacture* dan *Service*. Sektor *Agriculture* terdiri dari Sektor Pertanian, Kehutanan , Perburuan dan Perikanan. *Manufacture* terdiri dari meliputi Sektor Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, Konstruksi. Kemudian untuk Sektor yang termasuk dalam *Service* meliputi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, *Real Estate*, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya (BPS Kabupaten Jember, 2019).

Gambar 1.4.
Rata - rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah) di Beberapa Kabupaten/Kota Tahun 2020



Sumber: BPS Jawa Timur, 2021 (data diolah)

Gambar grafik 1.4. di atas menunjukkan rata – rata upah atau gaji bersih dari tenaga kerja formal menurut klasifikasi lapangan pekerjaan utama yaitu Sektor *Agriculture*, Sektor *Manufacture*, dan Sektor *Service*. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa dari perbandingan keempat kabupaten, Kabupaten Jember menduduki keunggulan pertama pada Sektor *Agriculture* yaitu dengan rata – rata upah atau gaji bersih sebesar Rp 1.524.764,- , kemudian untuk Sektor *Manufacture* dan *Service*, Kabupaten Jember berada pada urutan kedua setelah Kabupaten Situbondo dengan nominal rata – rata upah atau gaji bersih Rp 1.609.604,- dan Rp 1.971.143,- . Begitu pula untuk nilai total Kabupaten Jember berada pada posisi kedua setelah Kabupaten Situbondo yaitu sebesar Rp 1.774.217,- . Dengan melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa Kabupaten Jember masih cenderung ke dalam wilayah dengan penghasilan dari tenaga kerja

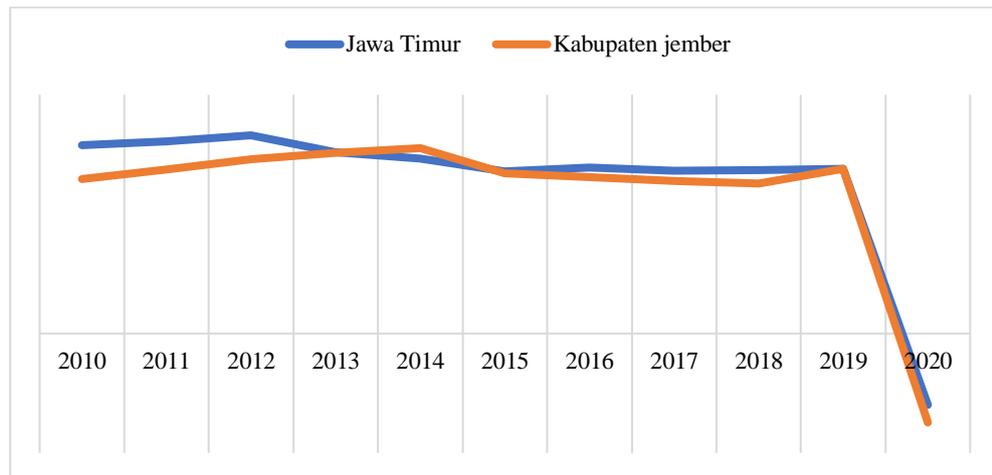
yang tergolong lebih besar daripada kabupaten – kabupaten lainnya yang berada pada daerah bagian Tapal Kuda.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan, faktor yang pertama yaitu dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Salah satu dari indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur kinerja dan produktivitas suatu wilayah dalam mengembangkan perekonomiannya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dijelaskan sebagai salah satu indikator ekonomi makro untuk mengetahui kinerja dan seberapa besar produktivitas yang ada di wilayah tersebut dalam membangun perekonomiannya, karena dengan adanya pertumbuhan dalam perekonomian berarti juga menunjukkan adanya penambahan dari jumlah barang dan jasa hasil dari 17 sektor lapangan usaha pada kegiatan ekonomi pada suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Angka yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi didapatkan dari hasil perhitungan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan (riil) pada tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya (BPS Kabupaten Jember, 2020).

Penentuan dari keberhasilan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terletak pada persentase pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkurangnya persentase dari angka kemiskinan. Kutipan Tambunan (2009) dari pernyataan Kuznet, bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang kuat, hal ini disebabkan oleh tingkat kemiskinan masyarakat yang cenderung mengalami

penurunan merupakan dampak apabila pertumbuhan ekonomi di suatu negara mengalami suatu progress yang stabil.

Gambar 1.5.
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2010 - 2020



Sumber: BPS Jawa Timur, Berbagai Tahun Penerbitan (data diolah)

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi pada gambar grafik 1.5. dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember secara keseluruhan cenderung masih berada pada posisi yang lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan. Sedangkan, pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sehingga menyebabkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang awalnya sebesar 6,21 persen (tahun 2014) menjadi 5,36 persen (tahun 2015). Penurunan ini terjadi selama 4 tahun berturut – turut, yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember rata - rata didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember memiliki angka yang paling rendah bahkan bernilai minus yaitu sebesar -2,98 persen. Rendahnya angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 diakibatkan adanya dampak dari pandemi *covid-19* sehingga menyebabkan peranan sektor – sektor perekonomian mengalami penurunan juga.

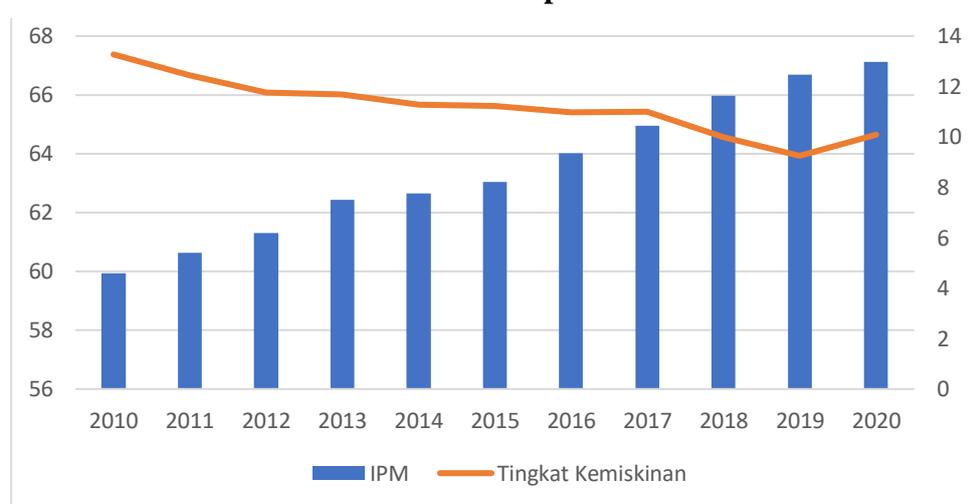
Kemiskinan menjadi persoalan yang sangat penting karena dengan mengetahui tingkat kemiskinan maka dapat diketahui juga kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi dapat juga menjelaskan keberhasilan dalam pembangunan manusia. Pembangunan Manusia merupakan satu indikator yang dapat menjelaskan kondisi penduduk di wilayah tersebut dengan melihat seberapa banyak penduduk yang telah mendapatkan hak yang semestinya, seperti masyarakat yang sehat dan makmur, mendapatkan dan menggunakan fasilitas pendidikan dengan baik, serta dapat meningkatkan produktivitas untuk mendorong peningkatan konsumsi yang pada akhirnya akan berdampak pada turunnya tingkat kemiskinan (Nainggolan, Sembiring & Nainggolan, 2021).

Indeks Pembangunan Manusia menjadi faktor penyebab dari tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan di suatu wilayah. IPM di dalamnya mencakup tiga komponen yang penting, yaitu umur panjang dan hidup

sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*) (BPS Kabupaten Jember, 2021b).

Pada kondisi ideal dengan Indeks Pembangunan yang tinggi maka akan berdampak pada rendahnya tingkat kemiskinan. Sedangkan, keadaan sebaliknya yaitu jika Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai yang rendah maka akan berakibat pada penurunan produktivitas kerja penduduk. Penurunan produktivitas inilah yang berdampak pada rendahnya pendapatan yang didapatkan oleh penduduk sehingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan.

Gambar 1.6.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jember



Sumber: BPS Kabupaten Jember, 2021 (data diolah)

Berdasarkan gambar grafik 1.6. di atas dapat dilihat bahwa nilai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten Jember selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya yang dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, hal ini dapat dijadikan sebagai tanda dari keberhasilan sosial dan ekonomi yang berdampak pada meningkatnya

kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan manusia di Kabupaten Jember. Peningkatan dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diakibatkan karena angka dari setiap komponen juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Persentase dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jember walaupun tidak menunjukkan kenaikan yang terlalu tinggi (masih berada di bawah 70 poin) tetapi tetap cenderung menunjukkan trend positif.

Peningkatan yang disebabkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berdampak pada persentase dari tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember. Berdasarkan fakta yang ada, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diikuti dengan penurunan pada tingkat kemiskinan di tahun 2010 hingga tahun 2016. Keterkaitan pada hal ini menunjukkan bahwa di tahun ketika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat yang diikuti dengan penurunan persentase tingkat kemiskinan, masyarakat di wilayah tersebut memiliki kualitas dan kesejahteraan yang baik. Kualitas sumber daya manusia inilah yang berdampak pada adanya kenaikan dalam produktivitas kerja masyarakat sehingga menunjukkan bahwa keadaan perekonomian di wilayah tersebut berjalan dengan sesuai kondisi yang ideal.

Penelitian yang menganalisis tentang pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan beberapa kali telah dilakukan sebelumnya, seperti pada penelitian Ardian, Yulmardi dan Bhakti (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara individual memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu,

penelitian Nainggolan (2020) menyatakan hal yang sebaliknya, yaitu dalam penelitiannya menyebutkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengentas permasalahan kemiskinan dengan sendirinya.

Penelitian selanjutnya terkait dengan pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil dari penelitian (Nugraeni & Aji, 2021) mengatakan jika pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur. Alasan yang diberikan yaitu karena ketika pertumbuhan ekonomi naik berarti menunjukkan juga bahwa kenaikan diikuti dengan produktivitas masyarakat sehingga akan diikuti dengan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian sebelumnya bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan, Sembiring & Nainggolan (2021), dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dapat dijelaskan karena unsur – unsur dalam mendorong kualitas sumber daya manusia tidak hanya berasal dari pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus diikuti dengan pemerataan dalam hal pembangunan.

Selanjutnya, penelitian tentang pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan merupakan hasil dari

penelitian Prasetyoningrum & Sukmawati (2018), menurut mereka dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan menyebabkan turunnya tingkat kemiskinan karena kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menandakan bahwa produktivitas kerja manusia di wilayah tersebut juga meningkat. Temuan lain mengenai hal ini yaitu hasil penelitian dari Padambo, Kawung & Rompas (2021) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, hal ini disebabkan mayoritas pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan masih termasuk dalam kategori sedang.

Dengan latar belakang yang telah sebagaimana diuraikan oleh penulis di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang peranan dari pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kaitannya terhadap penurunan tingkat kemiskinan dengan judul **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Variabel Intervening Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jember”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penulis di atas, penulis memutuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Maka dapat dituliskan rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jember secara langsung ?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember secara langsung ?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember secara langsung ?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel intervening ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan penulis dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jember secara langsung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember secara langsung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember secara langsung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel intervening.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu untuk dengan menggunakan data *time series*, adapun data *time series* yang digunakan yaitu data dari variabel pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat kemiskinan pada Kabupaten Jember selama periode tahun 2010 hingga tahun 2020.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel intervening, dan tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat. Ruang lingkup pada penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dapat atau tidak dapatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi variabel intervening antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan untuk bidang ekonomi pembangunan daerah khususnya yang terkait pada permasalahan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap persentase tingkat kemiskinan sehingga dapat bermanfaat bagi pengambilan kebijakan oleh pemerintah terkhusus pada pemerintah di Kabupaten Jember
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan bagi penulis lain pada penelitian selanjutnya mengenai tingkat kemiskinan dalam suatu daerah dengan variabel yang berbeda.